

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR  
 NOMOR 10 TAHUN 2018  
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK  
 PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN  
 2017-2021

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEANANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2017 - 2021

INSTANSI/ PERANGKAT DAERAH	MASALAH	KEGIATA N	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGG UNG JAWAB	PELAKSAN A	KELOMPOK SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI SOSIAL, REINTEGRASI DAN PEMULANGAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Belum ada <i>shelter</i> di Daerah	Fasilitasi <i>shelter</i> di Daerah	Pembangunan fisik dan perlengkapan <i>shelter</i> termasuk sekretariat tetap gugus tugas TPPO dan P2TP2A Provinsi Banten	Tersedia nyata empatterpad ubagikorban kekerasan / perdagangan orang	Jumlah <i>shelter</i> yang akan dibentuk semakin meningkat		X	X			DP3AKKB anten Provinsi Banten	Dinas PUPR Provinsi Banten	Masyarakat, gugus Tugas PP TPPO dan P2TP2A Banten
Dinas Sosial Provinsi Banten	Kondisi traumatik psikosial	Rehabilitasi Sosial KPO, KTK dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial	1. Penampungan 2. Perlindungan Awal 3. Asesmen 4. Intervensi	1. Pulihnyakondisi Psikososial klien 2. Berfungsi sosial secara wajar ajar	Prosentase (%) kasus yang ditangani untuk perlindungan dan pemulihan klien	x	x	x	x	x	Dinas Sosial Provinsi Banten	1. RPTC 2. P2TP2A 3. BP3TKI 4. Dinsos Kabupaten / Kota	1. KPO 2. KTK 3. PMBS

INSTANSI/ PERANGKAT DAERAH	MASALAH	KEGIATA N	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGG UNG JAWAB	PELAKSAN A	KELOMPOK SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI SOSIAL, REINTEGRASI DAN PEMULANGAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			5. Rujukan 6. Reintegrasi Sosial 7. Bantuan Sosial										

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANG GUNG JAWAB	PELAKSANA	KELOMPO K SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Kurangnya keterampilan guna kemandirian klien	Pelatihan keterampilan dan bantuan sosial	1. Seleksi calon peserta 2. Asesmen 3. Pelaksanaan 4. Pendampingan monitoring dan evaluasi.	Terciptanya usaha kemandirian klien	Berapa kali kegiatan pelatihan keterampilan	x	x	x	x	x	Dinas Sosial Provinsi Banten	1. Dinas Sosial; 2. Disnakertans; 3. Tim Gugus Tugas	1. KPO 2. KTK 3. PMBS
	Klien perlu penjemputan dan atau pemulangan	Fasilitasi penjemputan dan pemulangan klien	Koordinasi dgn RPTC Pusat, Dinsos Kab./ Kota dan Tim Gugus Tugas	Terlaksananya reintegrasi sosial dan pemulangan	Prosentase (%) klien dapat dijemput dan dipulangkan	x	x	x	x	x	Dinas Sosial Provinsi Banten	1. RPTC 2. Tim Gugus Tugas 3. BP3TKI 4. Dinsos	1. KPO 2. KTK 3. PMBS
	Belum optimalnya Pusat Informasi & Pelayanan bagi KPO, KTK dan PMBS	Fasilitasi Lembaga RPTC Dinsos Prov. Banten	Menghimpun data informasi dan laporan kasus KPO, KTK & PMBS	Tersedianya data informasi dan pelaporan	Penguatan kapasitas Lembaga RPTC	x	x	x	x	x	Dinas Sosial Provinsi Banten	1. Dinsos Prov. Banten 2. P2TP2A 3. Tim Gugus Tugas	RPTC Dinas Sosial Prov. Banten
BP3TKI	Belum maksimalnya penyuluhan ke Calon TKI padaCalon TKI berkaitanpenempatan TKI	Sosialisasi bahaya TPPO melalui KKN tematik TPPO	Melakukan KKN tematik TPPO	Pemahaman Masyarakat dan masyarakatnya penempatan TKI secaraunpr	I kali tingkatProvinsisampaitingkatkecamatan	x	x	x	x	x	DP3AKKB, BP3TKI	DP3AKKB, BP3TKI	Masyarakat

				osedural									
BP3TKI	Belummemahami informasitentang bahaya TPPO bagiCalon TKI	Pembekalan nAkhirpem berangkatan nMelaluike giatan PAP	MelakukanPe mbekalan	Pemahaman tentangb ahaya TPPO	100 % TKI memahami TPPO	x	x	x	x	X	DP3AKK B, BP3TKI	DP3AKKB, BP3TKI	Calon TKI
BP3TKI	TKIprosedural yang kembalike Indonesia terindikasi TPPO	Pemulanga ndanfasilit asikedatera hasal	Koordinasiden ganinstansiter kait	TKI kembalike daerahasal	100 % TKI dipulangka nkedaeraha sal	x	x	x	x	x	DP3AKK B, BP3TKI	DP3AKKB, BP3TKI	TKI

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUN G JAWAB	PELAKSAN A	KELOMPOK SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Belum adanya system informasi PP TPPO sehingga tidak tersedia database rincit tentang PP TPPO di Provinsi Banten	Fasilitasi Aplikasi Sistem Informasi PP TPPO Provinsi Banten	Membuat aplikasi system informasi terkait pencegahan dan penanganan TPPO	database rincit tentang PP TPPO di Provinsi Banten	Database di update setiap tahun	X	X	X	X	X	DP3AKKB Provinsi Banten	DP3AKKB Provinsi Banten	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Instansi terkait
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Kurang nyata masyarakat di kawasan rawan trafficking	Sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO di daerah rawan trafficking	Adanya Sosialisasi PTPPO	Mengetahui dan tanggapnya masyarakat terhadap kasus PTPPO di masing-masing daerah	sosialisasi, dilakukan setiap tahun di daerah rawan TPPO	X	X	X	X	X	DP3AKKB Provinsi Banten	DP3AKKB Provinsi Banten  Gugus tugas PP TPPO	Masyarakat umum daerah rantau trafficking
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Kurang pemahaman terkait persepsi tentang isu TPPO serta kurangnya kepedulian dan kepekaan terhadap	Capacity Building unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Workshop bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas	Peningkatan pemahaman dan menyamakan persepsi tentang isu PP TPPO dan tersedianya	workshop dilakukan setiap tahun & menghasilkan SOP gugus		X	X	X	X	DP3AKKB Provinsi Banten	DP3AKKB Provinsi Banten	Tim Gugus tugas

	isu TPPO	yang tergabungdala m Tim GugusTugas	PP TPPO	ndaroperasion alprosedurgug ustugas	tugas									
--	----------	--	---------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGG UNG JAWAB	PELAKSAN A	KELOMPO K SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	201 7	201 8	201 9	202 0	202 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Penduduk pendatang yang tidak mempunyai identitas dan tenaga kerja/buruh kontrak	- Sosialisasi kependudukan - Validasi data dari Desa & Kelurahan	Penertiban administrasi kependudukan	Tertib administrasi kependudukan tersedia data penduduk yang akurat	sosialisasi dilakukan setiap tahun pada buruh kontrak, data divalidasi/update		X	X	X	X	DP3AKKB Banten	- DP3AKKB Banten, - Satpol PP Provinsi Banten, - Polda Banten	Desa, RW dan RT
Kanwil Hukum dan HAM Banten	Tidak adanya pos terpadu deteksi dini TPPO di Kawasan Strategis Transit seperti Pelabuhan Merak dan Bandar Udara	Fasilitasi Pos Terpadu Deteksi Dini TPPO	Adanya kantor perwakilan yang biasa mendeteksi secara dini TPPO	Masyarakat yang akan menjadi korban TPPO dapat diberikan penanganan secara terpadu	Terbentuk POS terpadu deteksi dini TPPO		X	X	X	X	Kanwil Hukum dan HAM Banten	Kanwil Hukum dan HAM Banten BP3TKI Serang DP3AKKB Provinsi Banten Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Merak	Masyarakat Rawan TPPO

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGG UNG JAWAB	PELAKSAN A	KELOMPO K SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	201 7	201 8	201 9	202 0	202 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DinasPariwisa ta Provinsi Banten	Peningkatanjum lahwisata yang masukkeProvin siBantenmemu ngkinkanmemb awadampakneg atifterhadaptrafi kingperempuan dan anak	Bimbinganteknis / Penyuluhanpenc egahantrafikingp erempuan anaksertapenceg ahanpenyakitme nular HIV/AIDS di lingkungandunia usahasaranapari wisata	Memberikanpe nyuluhankepa damasyarakat mengenaidam pakburuk yang terjadidalamd uniapariwisata	Pariwisata yang sesuaidengansapt apesonadanterjag adari indikasi yang tidakbaikdalamd uniaindustripari wisata	bimbing an teknis dilakuka n setiap tahun	X	X	X	X	X	DinasPari wisata Provinsi Banten	DinasPariwi sata Provinsi Banten	Duniausah a kepariwisa -taan Masyaraka tdaerahpar iwisata

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGU NG JAWAB	PELAKS ANA	KELOMPO K SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGU NG JAWAB	PELAKS ANA	KELOMPO K SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KanwilKe menteria n Agama Provinsi Banten	Belummaksimal- nyapenyuluhan agama di Desa/Kelurahant entang PPTPPO	PembinaanPenyuluhan agama bagimasyarakat	Memberikanpe nyuluhankepa damasyarakat entangPerdaga ngan Orangdikaitka n dengan aspek agama	Tumbuhnyake sadaranpemah amanakanakib at TPPO dalam aspek agama	penyuluha n agama mengenai TPPO, dilakukan setiap tahun	X	X	X	X	X	KanwilKeme nterian Agama Provinsi Banten	KanwilK ementer ian Agama Provinsi Banten, Tim GugusT ugas PPTPPO	Masyaraka t
BP3TKI Serang	Belummaksimal- nyapenyuluhan di Desa/Kelurahan RawanPerdagang an orang tentang PPTPPO aspek hukum	PembinaanPenyuluhan bagimasyarakat	Memberikanpe nyuluhankepa damasyarakat entangPerdaga ngan Orang aspek hukum	Tumbuhnyake sadaranpemah amanakanakib at TPPO dari aspek hukum	penyuluha n TPPO aspek hukum dilakukan setiap tahun	X	X	X	X	X	BP3TKI Serang	BP3TKI Serang	Masyaraka t
Kantor ImigrasiS erang	MasihadanyaCal onKorban TPPO yang lolosdeteksidini	Verifikasi data melalui system informasiimigrasi	Melakukan verifikasi data melalui system informasiimigr asi	Deteksi dini calon korban TPPO	Verifikasi data dilakukan setiap tahun	X	X	X	X	X	Kantor ImigrasiSer ang	Kantor Imigrasi Serang  Tim GugusT ugas PPTPPO	Masyaraka t

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGU NG JAWAB	PELAKS ANA	KELOMPO K SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Masih adawargab anten yang mencobamenjadi TKI Unprosudural, sangat mungkin menjadi Sumber TPPO di Luarnegeri	1. Verifikasimelalui system informasi 2. Memintarekomenda sidari Kantor Kemenagbagi yang menjalankanumroh dan haji serta BNP2TKI bagicalon TKI dandisnakertrnasba gi TKI mandirimagang	Melakukansosi alisasimelalui media dansosialisasi peraturankeim igrasian di wilayahkerjak antorimigrasis erang	Meningkatnya pemahamanm asyarakattenta ng TKI unprosudural yang berpotensijadi korban TPPO	Sosialisasi keimigrasi an 4 kali	x	x	x	x	x	Kantor ImigrasiSer ang  BNP2TKI Disdukcapil Disnakertra ns Kementerian agama	Kantor Imigrasi Serang	Masyarakat Kota Serang, Kab. SerangKab . Pandeglan danKab. Lebak

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUN G JAWAB	PELAKSANA	KELOMPO K SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dinas Pember dayaanMasya rakatDesa	Belum adanyaR encanaAksiMa syarakattentan gpengecahan TPPO di tingkatDesa/ Kelurahan	PenyusunanRe ncanaAksiMas yarakat (RAM) untukpencega han TPPO di Desa/Keluraha n	Menyusu nRencana AksiMasy arakat (RAM- TPPO) padasem uadesa di 8 Kab/Kota	Masyarakat mempunyai kepeduliand anrencanaa ksinyauntu kupayapenc egahan TPPO	Terbentu k RAM TPPO di tingkat desa		X				DPMD ProvinsiBant en	DPMD ProvinsiBant en  DP3AKKB Provinsi Banten	Masyaraka t

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUN G JAWAB	PELAKSANA	KELOMPO K SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kurangnya pemahaman persepsi perangkat desa tentang Pencegahan TPPO	Capacity Building Pemerintah Tingkat Desa tentang Pencegahan TPPO	Pemerintah mempunyai daya upaya yang akan terwujudnya TPPO di Desa/kelurahan	Masyarakat memiliki persepsi yang sama tentang Pencegahan TPPO	Capacity building di daerah sasaran	X	X	X	X	X	DPMD Provinsi Banten	DPMD Provinsi Banten  DP3AKKB Provinsi Banten	Perangkat Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belum adanya lembaga peduli Pencegahan TPPO di tingkat Desa / Kelurahan	Pembentukan Lembaga yang akan menjadi Fasilitator dan Mediator pelaksanaan RAM TPPO	Membentuk Komite Responsif TPPO Masyarakat	Terbentuknya lembaga yang peduli TPPO dalam melaksanakan RAM TPPO	terbentuknya lembaga peduli TPPO	X	X	X	X	X	DPMD Provinsi Banten	DPMD Provinsi Banten  DP3AKKB Provinsi Banten	Masyarakat

INSTANSI/	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUN	PELAKSANA	KELOMPOK
-----------	---------	----------	-----------	-------------------	-----------	-----------	----------

OPD			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021	G JAWAB		SASARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belum ada anggaran pelaksanaan RAM TPPO di Desa/Kelurahan	Fasilitasi anggaran pelaksanaan RAM TPPO dan peran serta masyarakat, dunia usaha dan media	Tersedia anggaran pelaksanaan RAM TPPO	Program yang tersusun dalam RAM TPPO dapat diimplementasikan sehingga TPPO (Ada anggaran pelaksanaan RAM TPPO)	ada anggaran untuk pelaksanaan RAM TPPO, setiap tahun	X	X	X	X	X	DPMD Provinsi Banten	DPMD Provinsi Banten  DP3AKKB Provinsi Banten  BAPPEDA Prov. Banten	masyarakat, dunia usaha dan media
Dinas Perhubungan Provinsi Banten	Minimnya pemahaman masyarakat tentang perdagangan orang	Menyusun metode sosialisasi yang tepat pada masyarakat yang khususnya yang ada kegiatan transportasi (terminal bus, pelabuhan, halte, sekolah penyeberangan, pelabuhan udara)	Pelaksanaan penyusunan metode sosialisasi	Metode teknis sosialisasi di tempat yang ada kegiatan transportasi	Sosialisasi sesuai potensi daerah (pelabuhan, bandara, terminal bus)		X	X	X		- Dinas Perhubungan Provinsi Banten	- Dinas Perhubungan Provinsi Banten  - Polda Banten Diskominfo, Statistik & Persandian Prov. Banten	Masyarakat pengguna transportasi

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGU NG JAWAB	PELAKSANA	KELOMPOK SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
SUB GUGUS TUGAS PENEGAKAN HUKUM													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
P2TP2A Provinsi Banten	Kurangnya pendamping korban yang menguasai bidang TPPO	Peningkatan kompetensi bidang TPPO bagi pendamping korban	Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi bidang TPPO bagi pendamping korban	Pendamping korban yang kompetensinya dalam penanganan TPPO	Pelatihan setiap tahun	X	X	X	X	X	DP3AKKB Provinsi Banten	P2TP2A Provinsi Banten	Pendamping Korban

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGU NG JAWAB	PELAKSANA	KELOMPOK SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
SUB GUGUS TUGAS PENEGAKAN HUKUM													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Biro Hukum DAN Polda Banten	Belum merata- nyapengetaha- n masyarakat te- ntang TPPO	Sosialisasi Pe- ncegahan dan Penangan- an TPPO di Daerah Ra- wan TPPO	Melakukan pen- yuluhan hokum kepada masyar- akat daerah ra- wan TPPO	Masyarakat men- dapat pengetahu- an masyarakat te- ntang TPPO	Sosialisasi se- tiap tahun	X	X	X	X	X	Polda Banten	Direktorat Bin- mas Polda  Bidang Huku- m Polda	Masyarakat da- erah rawan TPPO

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUN G JAWAB	PELAKSANA	KELOMPOK SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	KELOMPOK SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Polda Banten	Tingkat kesadaran masyarakat untuk menginformasikan tentang TPPO di lingkungannya kurang	Sosialisasi kepada Masyarakat	Melakukan penyuluhan hukum terkait TPPO kepada masyarakat	Meningkatnya upaya hukum yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap TPPO	6 kab/kota	X	X	X	X	X	Polda Banten Biro Hukum Setda Provinsi Banten	Direktorat Binmas Polda  Bidang Hukum Polda	Masyarakat
Polda Banten	Minimalnya anggaran pengungkapan /Penyelidikan kasus TPPO	Mengungkapkan dan mencari parape laku TPPO guna diproses secara hukum lebih lanjut	Pengajuan pengungkapan penyelidikan	Tersedianya anggaran untuk pengungkapan kasus TPPO	Meningkatnya Pengungkapan kasus	X	X	X	X	X	DP3AKKB	Polda Banten	Masyarakat Korban TPPO
Polda Banten	Sinergitasan stakeholder penanganan TPPO masih dirasak kurang	Rapat koordinasi	Analisa dan evaluasi secara periodik	Meningkatnya sinergitasan stakeholder untuk mengurangi TPPO	Per triwulan	X	X	X	X	X	Gugus Tugas	DP3AKKB	Gugus Tugas

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGG UNG JAWAB	PELAKSAN A	KELOMPOK SASARAN
			PROSES	HASIL		2017	2018	2019	2020	2021			
SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN NORMA HUKUM													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dinas Pember dayaan Perem puan, Perlindungan Anak, Kependuduka ndan Keluarga Berencana Pro vinsi Banten	Korban bany ak berasal da ri Provinsi Banten	Melakukan Ko ordinasi denga n OPD kab/kota	Melakukan proses rehabilitasi esehatan dan rehabilitasi social serta Pemula ngan Korban kedaeraha sa 1	Korban dipu langkan ke d aerah asal	100 %	X	X	X	X	X	DP3AKKB Provinsi Banten	DP3AKKB Provinsi Banten  - Biro Hukum Setda Prov. Banten - Dinas Sosi al - Dinas Kese hatan/RS	Korban TPP O
Biro Hukum Setda Provinsi Banten	Revisi peraturan yang mengatur mengenai	Menyusun reg ulas daerah te ntang PP TPPO melalui Peratu	Membuat rev isi PERDA PP TPPO / perangkat hukum	Tersusun Peraturan Daerah Pencegahan & Penangan	100%	X	X				Biro Hukum Set da Provinsi Banten	- Biro Hukum Setda Pro vinsi Banten	Legislatif da neks ekutif

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGG UNG JAWAB	PELAKSAN A	KELOMPOK SASARAN
			PROSES	HASIL		2017	2018	2019	2020	2021			
SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN NORMA HUKUM													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PP TPPO Yang sesuaidenga nperundang -undangan yang berlaku	ran Daerah Yang sesuaidengan perundang- undangan yang berlaku	tingkat daerah Yang sesuaidenga nperundang- undangan yang berlaku	an PP TPPO								- DP3AKKB Provinsi Banten	

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUN G JAWAB	PELAKSANA	KELOMPOK SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Biro HukumSetda Provinsi Banten	Penanganankasus Trafiking yang masihbersifatseкто	Memfasilitasip enanganan korbansecarat	Penanganana n korbansec	TerpadunyaPenangan an	kasus yang ditangani secara	X	X	X	X	X	DP3AKKB Provinsi Banten	P2TP2A Provinsi Banten	Korban TPPO

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	KELOMPOK SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	ral	erpadu	araterpadu	Korban PTPPO	terpadu semakin meningkat							GugusTuga s	
KanwilHuku mdan HAM Banten	Kurangnyapengeta huanmasyarakatb ahwatindakpidana perdagangan orang melanggarhakasas imanusia	Sosialisasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang hakasasimanu sia UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO	AdanyaSos ialisasi PP TPPO berkaitand engan HAM	Mengetah uidan tanggapn yamasyar akatterha daphakas asimanus ia	sosialisasi dilakukan setiapp tahun	X	X	X	X	X	KanwilHuku mdan HAM Banten	KanwilHuk umdan HAM Banten	Masyarakat Rawan TPPO

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGU NG JAWAB	PELAKSANA	KELOMPOK SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dinas Tenaga kerjadan Transmigrasi Provinsi Banten	Kurang Pemaha man masyarakat tentang undan g- Undang Ketena -gakerjaan	Sosialisasi tent ang undang- Undang Ketena gakerja-an	Menumbuh- kankesadar anpekerjada nkeamanan pekerja	Pemahama n terhadap Undang- Undang ten agakerja	Sosialisasi dilaksana n setiap tahun	X	X	X	X	X	Disnakertra ns Provinsi Banten	Disnakertran s Provinsi Bantendan Instansiterka it	Perusahaan dan Kontraktor yang mempe- kerjakanten aga kerja luardaerah
Kantor Imigrasi Sera ng	Masih adawarg a Banten yang mencobamenja di TKI Un procedural baik tujuan umatautujuan menjalankanib adahunroh	1. Verifikasi data melalui system 2. Memintarek omendasida ri: a. Kantor kemena g bagi yang akanme njalanka numroh b. BNP2TK I bagicalo n TKI c. Disnake rtransba gi TKI	Melakukan sosialisasi melalui media dan sosialisasi siperaturan keimigrasia n di wilayah kerja kantor Imira si Serang	Meningkat nyapemah amanmasy arakattent ang TKI unprosedu ral yang berpotensij adikorban TPPO	Setiap tahun @ 4 kali	x	x	x	x	x	Kantor Imigrasi BNP2TKI Disdukcapil Disnakertra ns kemenag	Kantor Imigrasi Sera ng	Masyarakat kabupaten Serang, Kota Serang, kabupaten andeglangda n Kabupaten Lebak

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGU NG JAWAB	PELAKSANA	KELOMPOK SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Mandiri /Magan g											

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUN G JAWAB	PELAKSANA	KELOMPOK SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI KESEHATAN													
DP3AKKB, DinasKesehatan , RumahSakit	Belumadanyaan ggaranbidangke sehatanuntukm enanganikasus korban TPPO	PenyediaanA nggaran	Penangana nKorban TPPO	Tersediaang garanuntuk penanganko rban TPPO		x	x	x	x	x	DP3AKKB DinasKeseha tan	RumahSaki t	Korban TPPO

INSTANSI/ OPD	MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR			WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUN G JAWAB	PELAKSANA	KELOMPOK SASARAN
			PROSES	HASIL	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021			
SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI KESEHATAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pelatihan kapasitas petugas kesehatan terhadap perempuan dan anak korban tindak TPPO	Pelatihan KTA/PKorban TPPO	Adanya petugas kesehatan di setiap puskesmas dan Rumah Sakit Umum sebagai pusat layanan kesehatan	x	x	x	x	x	x	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	- Dinas Kesehatan Provinsi Banten  - DP3AKKB Provinsi Banten	Puskesmas dan RSUD Provinsi Banten
Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Minimnya Pusat Krisis Terpadu (PKT)/Crisis Center baik di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta	Fasilitas pembentukan Pusat Krisis Terpadu di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta	Melatih dan Membentuk Pusat Krisis Terpadu di bidang kesehatan	Tersedianya Pusat Krisis Terpadu (PKT) baik di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta	PKT yang akan terbentuk semakin meningkat		X	X	X	X	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	- Dinas Kesehatan Provinsi Banten  - DP3AKKB Provinsi Banten	Puskesmas dan RSUD Se-Propinsi Banten
Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Belum lengkapnya sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas, sehingga waktu pelayanan korban menjadi terhambat	Fasilitas pelayanan di sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas yang mampu melaksanakan KTP/A melalui bantuan keuangan	Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas	Puskesmas dapat menangani korban secara cepat	Jumlah puskesmas yang dilengkapi semakin meningkat	X	X	X	X	X	Dinas Kesehatan Provinsi Banten  DP3AKKB	- Dinas Kesehatan Provinsi Banten DP3AKKB Provinsi Banten	Puskesmas dan RSUD Se-Propinsi Banten

